



Realisasi PBB 2020 Sudah Tercapai Rp 19,4 M

YOGYA (KR) - Di tengah pandemi Covid-19, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogya sudah tercapai Rp 19,478 miliar. Setiap tahun, jatuh tempo pembayaran PBB selalu ditetapkan pada 30 September. Besaran tarif PBB tahun ini pun sempat menjadi sorotan akibat adanya penyesuaian.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menjelaskan bagi wajib pajak PBB yang merasa keberatan diberikan opsi untuk mengajukan keringanan kepada walikota. "Sampai 30 Juni 2020 total ada 8.459 wajib pajak yang sudah mengajukan keringanan," jelasnya, Rabu (1/7).

Pada tahun anggaran 2020, BPKAD Kota Yogya menerbitkan 95.273 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Target pendapatan dari pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 90 miliar. Target tersebut naik Rp 4 miliar dari realisasi PBB tahun 2019 lalu yang mencapai Rp 86 miliar.

Khusus tarif PBB tahun ini, Pemkot melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan itu salah satunya merupakan rekomendasi dari KPK karena sudah empat tahun belum pernah disesuaikan. Padahal, merujuk aturan, setiap tiga tahun seharusnya ada penyesuaian. "Dari sekitar 95 ribu wajib pajak, yang sudah membayarkan 22.738 wajib pajak. Total yang masuk sudah Rp 19,478 miliar," imbuh Wasesa.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut memberikan perpanjangan pengajuan keringanan PBB sampai sebulan ke depan atau akhir Agustus. Sesuai asumsi awal, SPPT PBB ditargetkan sudah terdistribusi ke penerima pada 31 Maret 2020. Dengan begitu batas akhir pengajuan keringanan ialah 30 Juni 2020. "Sudah kami perpanjang sampai Agustus. Proses pengajuan maupun untuk memberikan persetujuan butuh waktu. Sampai saat ini ju-

ga masih banyak berkas yang perlu saya tandatangani," katanya.

Selain pengajuan keringanan, pengurangan tarif PBB juga sudah dilakukan secara otomatis melalui pemberian stimulus. Besaran stimulus bervariasi, bagi ketetapan NJOP sampai Rp 500 juta, stimulusnya 70 persen. Kemudian di atas Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar diberikan stimulus 65 persen. NJOP di atas Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar stimulusnya 60 persen. NJOP antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar stimulusnya 55 persen. Sedangkan NJOP di atas Rp 5 miliar besaran stimulusnya 50 persen.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, mengapresiasi upaya perpanjangan pengajuan keringanan PBB tersebut. Menurutnya, dewan sudah memberikan rekomendasi agar tarif PBB tahun ini nilainya disamakan dengan tahun 2019. Rekomendasi diberikan seiring kejadian luar biasa dengan mewabahnya virus Korona yang berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005